BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah organisasi internasional biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu organisasi yang didirikan melalui perjanjian oleh dua atau lebih negara. Setiap organisasi internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan peran-peran dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Peran organisasi internasional adalah wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghsasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan, dan adakalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping operation* dan lain-lain) (Rudy, 2009: 27).

Dewasa ini dalam fenomena hubungan internasional, isu lingkungan menjadi perhatian masyarakat internasional karena nyata keberadaannya. Munculnya isu lingkungan dalam studi hubungan internasional menjadi cerminan dari perkembangan politik global bahwasanya lingkungan dapat mempengaruhi berbagai aspek lainnya. Dengan adanya globalisasi membuat perkembangan perspektif masyarakat internasional menjadi semakin beragam. Hubungan internasional tidak lagi hanya mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, dan

pertahanan namun mulai merambah pada isu lingkungan. Isu lingkungan menjadi perhatian dan perbicangan karena munculnya fenomena-fenomena alam yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia akibat adanya laju pertumbuhan penduduk sehingga memicu ketidakseimbangan antara manusia dengan alam. Hal-hal negatif yang terjadi adalah bencana alam. Bencana alam terjadi seperti tamu yang tak diundang karena bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Dampak negatif dari permasalahan lingkungan tidak hanya dirasakan dalam skala nasional namun juga dalam skala internasional. Dampak negatif ini dirasakan melalui perubahan iklim yang kini mulai terasa. Dampak-dampak negatif lainnya seperti, banjir dan kabut asap. Banjir mengakibatkan kelaparan, penyebaran penyakit, longsor, erosi, pencemaran lingkungan, merusak sarana dan prasarana, melumpuhkan jalur transportasi, terhambatnya aktifitas, dan kerugian bagi makhluk hidup, baik materi maupun nonmateri hingga kematian. *United Nation Economic and Social Commision For Asia and Pasific* (UNESCAP) adalah Badan Regional PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik yang berkedudukan di Bangkok, Thailand. UNESCAP menangani berbagai isu sektoral antara lain, pengentasan kemiskinan, manajemen globalisasi, dan penganganan isu-isu sosial. Dalam struktur organisasi PBB, UNESCAP merupakan salah satu Komisi Regional yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN-ECOSOC/*United Nations Economic and Social Council*). Dibanyak programnya UNESCAP memiliki program mengenai pengelolahan air bersih salah satunya proyek Penerapan Sistem Penyediaan Air Bersih dan Pengelolahan Air Limbah berbasis masyarakat untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim sejumah kegiatan dilakukan untuk

meningkatkan kapasitas pembuatan kebijakan dan perencanaan adapun sasaran UNESCAP untuk pengembangan infstruktur air bersih yang ramah lingkungan yaitu, di Indonesia dan Fhilipina. Untuk penerapan infrastuktur air ramah lingkungan di kedua Negara tersebut dikembangkan melalui sejumlah pertemuan, konsultasi dan perkumpulan pakar dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemerintah untuk menunjukkan infrastruktur yang efisien dan menjadi percontohan untuk penerapan sistem pengelolahan air limbah dan sistem pemanenan air hujan, yang bertujuan untuk mengembalikan kualitas air sungai yang memburuk melalui pengelolahan air limbah dan diversifikasi sumber pasokan air dengan memanen air hujan. Perencanaan dan penerapan ini dilakukan dengan pemerintah kota didua Negara tersebut. Di Indonesia diterapkan di Kota Bandung dan Fhilipina di Departemen Ilmu pengetahuan dan Teknologi Wilayah 7,Cebu (http://www.unescap.org/about/programme). Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk terpesat, kemajuan dalam berbagai aspek yang signifikan menjadikan peningkatan kebutuhan air bersih yang besar pula, diperparah dengan jumlah air buangan (limbah domestik) yang tidak seimbang jumlah air limbah yang dihasilkan di Kota Bandung setiap harinya 70%-80% dengan pemakaian air bersih setiap orang 150 lt/hari dengan keluaran air limbah105lt/org/hari(http://pambdg.co.id/new2/index.php?option=com_content&view=arcticle&id=58&ltemid=73 diakases pada tanggal 7 maret 2017). Banyaknya industri dan pemukiman baru di Kota Bandung mendorong peningkatan kebutuhan air bersih di Kota Bandung dan sekitarnya maka dari itu masyarakat seharusnya dapat dengan baik berpartisipasi untuk proyek ini.

saat ini kebutuhan air bersih di Kota Bandung mencapai 1,5% $m^{3/}$ kapita/hari namun tidak sebanding dengan kapasitas air yang hanya mampu memenuhi 69,3% dari kebutuhan masyarakat atau sekitar 0,6 m^3/kapita/hari. Untuk itu pengelolahan air bersih di Kota Bandung dikelola oleh PDAM Tirawening yang memanfaatkan 3 (tiga) sumber air baku yaitu air tanah, air permukaan dan mata air, namun hingga saat ini pengelolahan air bersih yang dilakukan masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung, dari ketiga sumber mata air baku tersebut air permukaan adalah yang paling besar untuk dapat dikelola yang mampu memasok air bersih dengan debit rata – rata 2300 I/detik, 3 (tiga) sungai tersebut adalah sungai Cisangkuy, sungai Cikapundung, sungai Cibereum, dan sungaiCipanjalu(http://pambdg.co.id/new2/index.php?option=com_content&view=artcle&id=55&ltemid=67 diakses pada tanggal 11 Maret 2017).

Sebagai sungai terbesar kualitas air sungai Cikapundung sebagai penyedia air baku untuk kebutuhan air bersih di Kota Bandung semakin hari semakin menurun yang diakibatkan adanya perubahan tata guna lahan yang kurang memperhatikan kaidah lingkungan, sempadan sungai yang rawan longsor dan erosi, fluktuasi debit sungai yang besar dimana pada musim kemarau kering sedangkan pada musim hujan terjadi banjir, penyempitan badan sungai akibat pembangunan pemukiman liar, pencemaran limbah domestik, limbah rumah sakit dan limbah pabrik serta pendangkalan oleh sadimen dan sampah. Selain itu, metode pengelolaan air bersih yang sudah ada belum optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Bandung sehingga diperlukan pengembangan disektor tersebut. Hal itu kemudian mendorong UNESCAP sebagai lembaga

regional PBB di kawasan Asia Pasifik yang fokus pada pembangunan untuk mengembangkan sistem pengelolaan air bersih terpadu yang berbasis pada model lingkungan berkelanjutan atau *Eco-sustainable Water Infrastructure* (ESWIn) (http://www.unescap.org/about/ESWin).

Pengelolaan air bersih dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural, berfokus pada daerah padat penduduk, kawasan strategis serta pusat pertumbuhan ekonomi dengan cara revitalisasi sungai dan menerapkan nilai-nilai efisiensi ekonomi dan lingkungan. *Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2010-2014*) Oleh karena itu, Bandung dipilih sebagai target pencapaian ESWIn untuk wilayah perkotaan karena selain tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kota ini juga memiliki Sungai Cikapundung sebagai kawasan strategis bagi pengembangan metode pengolahan air tersebut. Penerapan ESWIn dalam revitalisasi sungai Cikapundung tidak hanya melibatkan UNESCAP dan Pemerintah Kota Bandung saja, melainkan juga Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi (ITB dan UNPAS) untuk mengerjaan proyeknya, serta masyarakat setempat. UNESCAP merupakan inisiator yang memulai perkembangan ESWIn di Asia Pasifik, metode ini diyakini mampu melahirkan sistem pengolahan air yang baru untuk menggantikan metode konvensional dalam pengelolaan sumber daya air yang mengacu pada proyek-proyek rekayasa sipil, seperti bendungan, saluran air, dan kanal, baik itu di negara maju maupun berkembang didasari pemahaman akan ketidakberlanjutan dari metode konvensional, contohnya pada waduk/bendungan terjadi penguapan akibat sinar matahari yang berkepanjangan dan justru berpotensi mengurangi kuantitas

sumber daya air, bahkan memicu gangguan ekosistem. ESWIn menitikberatkan pada nilai dan kontribusi prinsip *eco-efficiency* kedalam pengembangan infrastruktur air yang efisien, yaitu efisiensi lingkungan, melalui *reuse* dan *recycle* air limbah dan intersepsi hujan, serta efisiensi ekonomi melalui pengurangan biaya penyediaan air dengan mengacu pada serangkaian kegiatan internasional yang secara khusus berorientasi pada tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip efisiensi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam ESWIn, antara lain: minimalisasi limbah, minimalisasi permintaan air tawar, penurunan kebutuhan pengolahan air limbah, pendekatan khusus pada situasi lokal, sosialisasi pembiayaan pengelolaan air limbah serta penetapan kerangka aturan untuk mendukung instalasi sistem pengolahan air limbah. Selain itu, UNESCAP juga mendorong kemauan politik dari pemerintah untuk desentralisasi kebijakan yang lebih luas sampai ke lapisan masyarakat melalui berbagai langkah-langkah kebijakan khusus di bidang pengelolaan sumber daya air. Langkah-langkah kebijakan tersebut meliputi penerapan pendekatan tepadu pengelolaan sumber daya air, perubahan praktek operasional dan manajemen di bidang infrastruktur air.

Pendekatan kebijakan yang dilakukan UNESCAP sangat mempertimbangkan kompleksitas masalah politik, kelembagaan, dan keuangan, ditambah dengan pertimbangan pengambilan keputusan yang demokratis dan pengenalan skema kerjasama sektor publik. Sehingga dalam pelaksanaanya, ESWIn tidak hanya digerakkan oleh pemangku kebijakan di pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakatnya. Sebelum kehadiran ESWIn, Perencanaan

dalam pengelolaan sumber daya air dan proses pengambilan keputusan telah didominasi oleh pusat dan dianggap dapat memberikan kontribusi positif kepada ketahanan sumber daya alam. Namun, sistem perencanaan sentral dalam pengelolaan air mengakibatkan pengendalian terhadapanya justru tidak efisien, khususunya di daerah. Pemerintah pusat seringkali kekurangan informasi riil mengenai kebutuhan lokal karena lebih fokus pada kebijakan di pusat. Karenanya, pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan dasar di tingkat terendah dalam hal pengelolaan air. Pemeriksaan dan pemantauan secara berkala harus dilakukan guna mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan di tingkat masyarakat sudah tepat atau belum. Untuk melaksanakan hal tersebut, UNESCAP menilai perlunya peran aktif dari masyarakat sehingga pengelolaan kebutuhan dasar atas sumber dan akses air bersih dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Sebuah strategi baru dalam pengelolaan air bersih pun diaplikasikan melalui ESWIn dengan pendekatan desentralisasi dengan konsekuensi pemerintah pusat harus siap untuk berbagi kekuasaan politik, administrasi serta keuangan dengan para pemangku kepentingan lokal, khususnya yang membidangi pengelolaan DAS. Selanjutnya, guna mewujudkan pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, maka UNESCAP dan Pemerintah Indonesia menyusun *Strategic Roadmap* untuk pelaksanaan ESWIn. Adapun tujuan dari roadmap antara lain untuk menentukan visi ESWIn bagi Indonesia dan wilayah ekonominya, menguraikan dan mengusulkan mekanisme untuk menyelaraskan kembali dokumen perencanaan yang ada, mengkoordinasikan berbagai kegiatan antara berbagai sektor yang terkait dengan pengembangan

sumber daya air untuk mencapai kelestarian sungai, membangun proses komunikasi yang efektif dalam mendukung pendekatan ESWIn, serta menentukan dan membimbing rencana pelaksanaan dan kegiatan yang relevan menuju visi ESWIn, termasuk penyebaran informasi, *capacity building*, dan mekanisme pendanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, roadmap ESWIn dilaksanakan melalui dua tahap yaitu Perencanaan Roadmap Strategis ESWIn (Tahap pertama) dan Implementasi Roadmap ESWIn (Tahap kedua). Tahap pertama menitikberatkan pada posisi ESWIn dalam mendukung prinsip-prinsip MP3EI. Tujuan utama dari tahapan ini adalah meningkatkan kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, BAPPENAS, sebagai badan koordinasi berwenang dalam melakukan perumusan roadmap yang memuat perencanaan baik jangka menengah maupun jangka panjang untuk menerapkan ESWIn kedalam tata pengelolaan DAS dan air bersih.Tahap kedua merupakan perwujudan roadmap ESWIn. Untuk mencapai hal tersebut, maka investasi di bidang infrastruktur diarahkan pada pengelolaan DAS dan pengolahan air bersih, selain itu dilaksanakan pula kegiatan promosi ESWIn dalam perencanaan pembangunan nasional, serta pembinaan kapasitas secara kolektif melalui pengembangan institusi (*institution building*). Dalam tahapan ini BAPPENAS berperan sebagai fasilitator komunikasi dan koordinasi dalam mengembangkan roadmap, mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan, berbagi pengetahuan tentang mekanisme inovatif dalam pelaksanaan ESWIn, serta mekanisme pembiayaan untuk meningkatkan dan menarik investasi dalam pelaksanaan ESWIn.

Dalam menjalankan peran-peran tersebut, BAPPENAS berkolaborasi dengan kementerian lainnya, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berwenang memastikan bahwa ESWIn dapat melengkapi tujuan dari MP3EI dan Rencana Pembangunan Nasional, baik jangka panjang maupun menengah. (*A Strategic Roadmap to Implement ESWIn in Indonesia*,http://www.unescap.org).

Selanjutnya Pemerintah Kota Bandung menyesuaikan RPJPD dan RPJBD serta merancang perencanaan dan pelaksanaan ESWIn melalui revitalisasi sungai cikapundung di Kota Bandung kedalam RABPD. Berdasarkan pada pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang, ESWIn tidak hanya sebatas menjadi metode pengelolaan dan pengolahan air dalam revitalisasi sungai sebagai instrumen penting pemasok baku air, melainkan juga diharapkan mampu mengoptimalkan pasokan sumber daya air untuk mencegah krisis dan menanamkan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, misi ESWIn adalah untuk mengembangkan infrastruktur di perkotaan, pedesaan, pertanian, industri dan energi yang akan meningkatkan efisiensi air, makanan dan energi, mengurangi limbah serta mencapai kelestarian sungai. UNESCAP juga berperan sebagai fasilitator dalam penerapan ESWIn di Indonesia, khususnya di Bandung, UNESCAP menekankan pentingnya partisipasi yang lebih efektif dari pemerintah di berbagai tingkatan yang menangani permasalahan air. Untuk itu, UNESCAP sebagai komisi regional pembangunan di Asia Pasifik berperan penting sebagai bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, serta

organisasi baik itu publik, swasta, antar pemerintah maupun non pemerintah untuk melaksanakan berbagai diskusi tentang metode pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air melalui Sub-komite Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan pada Komite Manajemen Globalisasi atau *Committee on Managing Globalization.*

Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap munculnya perdebatan baru mengenai beragam ide dan informasi, mempermudah identifikasi isu-isu yang harus ditangani, menjelaskan kemampuan yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan, dan mencapai kesepakatan tentang pelaksanaan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya air serta untuk menjelaskan hak-hak dan tanggung jawab untuk penggunaan, pemeliharaan dan konservasi sumber daya air secara tepat. Partisipasi *stakeholder* dapat dijadikan cerminan opini masyarakat dan untuk mengidentifikasinya. *Stakeholder* diberikan arahan tentang metode ESWIn dan mengapa pendekatan inovatif ini dibutuhkan untuk infrastruktur air. Proses ini berlangsung melalui jejak pendapat, pertemuan, konsultasi dan lokakarya baik di tingkat kelembagaan dengan berbagai kajian, antara lain: pengembangan kebijakan dan kerjasama dalam pelaksanaan ESWIn, desain teknis baik untuk konteks pedesaan maupun perkotaan, mekanisme keterlibatan untuk meningkatkan kesadaran, advokasi dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan ESWIn, termasuk membangun hubungan, komunikasi interpersonal, dan negosiasi, pemantauan dan evaluasi meliputi hasil dan timbal balik dalam mekanisme roadmap, mediator bagi pemerintah untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan terkait ESWIn serta demonstrasi proyek.

Selain itu, UNESCAP juga mempromosikan *capacity institutional building* atau pengembangan kapastitas institusi dan memberikan pengetahuan tentang teknologi hijau untuk meningkatkan produktivitas serta mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian pembangunan infrastruktur skala besar yang modern. Beberapa tindakan yang dilakukan UNESCAP dalam mempromosikan hal tersebut antara lain: dengan mengidentifikasi dan menampung kesenjangan pengetahuan dalam menerapkan ESWIn, memperdalam pengetahuan dan pengelolaan DAS, meningkatkan pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah melaluli subsidi dan dukungan keuangan lainnya, membuat mekanisme kelembagaan yang memfasilitasi kerjasama publik-swasta pada peningkatan pengetahuan dan pengembangan teknologi, dan memastikan sistem manajemen pengetahuan yang transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. UNESCAP juga berperan dalam hal menyalurkan bantuan dana untuk pelaksanaan ESWIn. Pemerintah Kota Bandung mendapat bantuan dana sebesar USD 200.000 dari UNESCAP untuk revitalisasi sungai Cikapundung pada bulan Januari 2012. (http://portal.bandung.go.id)

Selain bantuan langsung, UNESCAP juga menyalurkan bantuan dana dari KOICA (*Korean International Cooperation Agency*) untuk upaya revitalisasi sungai Cikapundung. KOICA telah melaksanakan lokakarya regional "*Low-carbon Green Growth for Asia and the Pacific*" untuk menyajikan laporan kegiatan tahunannya dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Selanjutnya, melalui kemitraan yang lebih erat dengan instansi yang membidangi permasalahan tersebut, KOICA membantu penguatan pada sektor lingkungan dengan organisasi

multilateral, dan sebagai hasilnya, *Korean Institute of Construction Technology*, UKM yang membidangi pengolahan air dan konsultan terlibat dalam proyek UNESCAP. Pada tahun 2011, KOICA memberikan bantuan sebesar KRW 815 Juta atau setara dengan 10 Miliar Rupiah yang disalurkan melalui UNESCAP dalam rangka mendukung upaya yang dilakukan lembaga tersebut dalam mengembangkan ESWIn di Asia Pasifik, termasuk dalam revitalisasi sungai Cikapundung. Pada tahun 2011 UNESCAP mengimplementasikan dua proyek dalam kerangka ESWIn bekerjasama dengan UNESCAP, KOICA, BAPPENAS, Pemerintah Kota Bandung, ITB (Institut Teknologi Bandung) dan UNPAS (Universitas Pasundan) yaitu Proyek Revitalisasi Sungai Cikapundung di Kota Bandung dengan penerapan Pengolahan Air Limbah dan Pemanenan Air Hujan di Sungai Cikapundung. Atau UNESCAP menyebutnya *Community-based Wastewater Treatment System* dan *Rainwater Harvesting Management For Water Supply System.*

Karya tulis yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian ini, yaitu dalam kaitannya revitalisasi sungai cikapundung oleh UNESCAP yaitu "*Peran Economic And Social Commision For Asia And Pasific (ESCAP) Melalui Eco-Sustainble Water Infrastructure Dalam Revitalisasi Sungai Cikapundung Tahun 2011-2013"* yang ditulis oleh Syarifah, Yaumil. Dalam skripsi ini membahas hal yang sama yaitu tentang peran OI sebagai salah satu aktor dalam masyarakat internasional tentu memiliki peran yang strategis guna mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu OI yang turut serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah UNESCAP melalui

proyek-proyek yang telah dilaksanakanya. Lebih spesifik dapat dilihat dalam proyek *Community-based Wastewater Treatment System* dan *Rainwater Harvesting Management For Water Supply System.* Yang merupakan proyek revitalisasi dan pemanfaatanya agar dapat terus diperdayakan oleh masyarakat setempat. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peran dan upaya UNESCAP dalam Revitalisasi sungai cikapundung. Yang membedakan adalah tahun penelitian yang diteliti. Skripsi ini mengambil sedangkan penulis mengambil perkembangan dan hasilnya.

Karya tulis selanjutnya yang membahas isu lingkungan yang diangkat sebagai penelitian terdahulu ialah penelitian dalam bentuk skripsi oleh Yuda Iskandar, yang mengangkat judul "Peranan *Greenpeace* Melalui Program Detox Campaign Dalam Mengurangi Limbah Beracun Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum", dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan mengenai sebuah organisasi internasional yaitu *Greenpeace* yang merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam permasalahan lingkungan. Adapun dalam tulisan ini dijelaskan sebagai fokus kajian nya ialah bagaimana *Greenpeace* berusaha untuk menyelamatkan lingkungan dengan tujuan mengurangi limbah beracun yang diakibatkan oleh fasilitas manufactur tekstil yang menyebabkan terjadinya pencemaran air yang menjadi beracun disungai seluruh dunia, terutama didaerah aliran sungai Citarum Jawa Barat tersebut sebagai penelitian yang dikaji melalui sebuah program yang dibuat oleh *Greenpeace yaitu* Program Detox Campaign. Tidak hanya masalah polusi udara, polusi air, kebakaran hutan dan lain-lainnya yang mengakibatkan tipisnya lapisan ozon yang pada akhirnya mengakibatkan

terjadi pemanasan global yang sudah dirasakan hampir di seluruh belahan dunia, tidak hanya itu, apa yang disebut dengan sampah juga menjadi masalah yang tidak bisa dihindari khususnya bagi negara-negara berkembang tetapi yang dihadapi sekarang adalah masalah air bersih sebagai sumber pokok kehidupan umat manusia. Salah satu masalah lingkungan yang sering kali muncul adalah masalah ketersediaan air bersih. Sebab masalah air bersih ini berpotensi terhadap rentan terjadinya konflik karena seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap air bersih pun meningkat sebagai contoh yang telah terjadi adalah negara-negara dikawasan Timur Tengah sehingga permasalahan air bersih ini menjadi kajian penting dalam isu lingkungan.

Di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sumber air untuk kehidupan didapatkan dari air tanah, dan sungai untuk itulah pencemaran sungai dapat mengurangi ketersediaan air bersih untuk kehidupan. Dalam penelitian tersebut sebagai fokus kajian adalah peranan Greenpeace melalui program Detox Campaign untuk mengurangi limbah beracun di daerah aliran sungai (DAS) Citarum, sungai Citarum dipilih sebagai objek penelitian karena sungai Citarum merupakan sungai yang sangat penting dengan menjadikan sungai Citarum sebagai sumber air bagi masyarakat. Kemudian penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dengan mencatat dan menyelidiki objek, gejala, atau peristiwa dan fakta yang menjelaskan tentang peranan *Greenpeace* selaku NGO melalui program *Detox Campaign*. satu tujuan dari program *Detox Campaign* ini adalah menyarankan dan mendesak pemerintah untuk mengendalikan pembuangan limbah industri yang terjadi di sungai Citarum yaitu

dengan memaksimalkan aturan aturan yang telah dibuat dan disepakati dengan menyuruh pabrik-pabrik yang ada di sekitar sungai untuk meminimalisir dan menghentikan pembuangan limbah tersebut, serta memberikan efek jera dengan mamberi sanksi tegas seperti menutup pabrik tersebut dan untuk masyarakat diberikan wadah yang tepat dengan membangun tempat-tempat pembuangan sampah di sepanjang aliran Citarum. Kenaikan jumlah produksi limbah yang masuk ke sungai Citarum agak berkurang setelah *Greenpeace* memberikan sosialisasi kepada warga dan memperingatkan pabrik-pabrik untuk tidak membuang sampah di sungai Citarum. Disini *Greenpeace* juga mendesak pemerintah untuk lebih serius dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya limbah. *Greenpeace* menargetkan pada tahun 2025 sungai Citarum bebas dari limbah industri maupn limbah rumah tangga. Target ini tentu saja sangat sulit dilakukan karena setiap tahun jumlah pabrik yang ada di sepanjang sungai Citarum terus meningkat dan akan selalu menghasilkan limbah, tidak hanya itu jumlah masyarakat juga akan terus meningkat seiring bertambahnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran UNESCAP dalam Revitalisasi Sungai Cikapundung di Kota Bandung terhadap perkembangan pengelolahan air bersih. Sehingga peneliti mengangkat judul **"Peran *United Nation Economic And Social Commision For Asia And Pasific* (UNESCAP) Dalam Revitalisasi Sungai Cikapundung Di Kota Bandung (2012-2017)"**

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain:

1. Organisasi Internasional yang merupakan fokus kajian peneliti menyangkut keterlibatan Organisasi Internasional. Didalam matakuliah ini peneliti mempelajari mengenai bagaimana peranan aktor yang terlibat dalam interaksi antar Negara yang bersifat internasional dan menciptakan interaksi global. UNESCAP sebagai Organisasi Internasional berupaya mengoptimalkan perananya.
2. *Environmental Issues* merupakan fokus kajian peneliti menyangkut tentang masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan hidup dan pengaruhnya terhadap global, misalnya pentingnya revitalisasi sungai secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana Peran UNESCAP dalam Revitalisasi Sungai Cikapundung di Kota Bandung?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana upaya yang diterapkan UNESCAP untuk Revitalisasi Sungai Cikapundung di Kota Bandung ?
2. Apakah kendala UNESCAP dalam Revitalisasi Sungai Cikapundung di Kota Bandung?
3. Bagaimana hasil dari Revitalisasi Sungai Cikapundung oleh UNESCAP?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembahasan masalah akan dibatasi sesuai dengan judul yang diambil yaitu peranan organisasi internasional khusus di kawasan Kota Bandung, penelitian ini akan melihat peran UNESCAP dalam revitalisasi sungai Cikapundung untuk pengelolahan air bersih di Kota Bandung, batasan waktu yang di ambil peneliti yaitu dari tahun penerimaan dana hingga target penyelesaian 2012-2013 dengan melihat pemberian dana program selama rentang waktu tersebut, dan melihat perkembanganya hingga tahun 2017 saat ini.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini agar mengetahui dan menganalisis peran yang dilakukan UNESCAP dengan perwakilan pemerintah Kota Bandung melalui upaya pengelolahan air bersih serta mengetahui upaya yang dilakukan UNESCAP sebagai mitra yang berperan dalam pengelolahan air bersih

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya yang diterapkan UNESCAP untuk Revitalisasi Sungai Cikapundung di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala UNESCAP dalam Revitalisasi sungai Cikapundung di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hasil dari Revitalisasi Sungai Cikapundung oleh UNESCAP di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya tentang peranan organisasi internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas pada umumnya, dan khususnya bagi Praktisi Hubungan Internasional dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang peran UNESCAP di Kota Bandung dalam Revitalisasi Sugai Cikapundung.